



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM D.I YOGYAKARTA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Monica Dhamayanti  
Jabatan : Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah D.I Yogyakarta

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Agung Rektono Seto  
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I Yogyakarta

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Yogyakarta, 1 Februari 2024

Pihak Kedua,  
Kepala Kantor Wilayah D.I Yogyakarta

AGUNG REKTONO SETO  
NIP 197012021999031001

Pihak Pertama,  
Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM  
D.I Yogyakarta

MONICA DHAMAYANTI  
NIP 196901251997032002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM DENGAN KEPALA KANTOR**  
**WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM D.I YOGYAKARTA**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah	Persentase Peningkatan PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah	6%
2.	Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang Diselesaikan	90%
3.	Terwujudnya Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah	Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah	30%
4.	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual di Wilayah	1. Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah	70%
		2. Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah	20%
5.	Terfasilitasinya Rancangan Produk Hukum di Daerah	Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	80%
6.	Meningkatnya Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan	25 Orang
7.	Meningkatnya Pemerintah Daerah yang Melaksanakan Program Aksi Hak Asasi Manusia serta Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pengaduan Hak Asasi Manusia di Kewilayahan	1. Persentase Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan di Kewilayahan	50%
		2. Persentase K/L/D yang mendapatkan diseminasi dan Penguatan Hak Asasi Manusia terhadap total K/L/D di Kewilayahan	25%
		3. Persentase Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia terhadap Total Kabupaten/Kota yang Berpartisipasi di Wilayah	35%
		4. Persentase Pelaksanaan RANHAM di Kewilayahan	75%
		5. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Hak Asasi Manusia di Kewilayahan	3,33 Indeks
8.	Meningkatnya Produk Hukum Daerah yang Berperspektif Hak Asasi Manusia	Persentase Tanggapan terhadap Rekomendasi Produk Hukum Daerah Berperspektif Hak Asasi Manusia yang Ditindaklanjuti terhadap Total Rekomendasi Produk Hukum Daerah yang Disampaikan	90%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
9.	Terwujudnya Analisis dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah serta Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	1. Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan	1 Dokumen
		2. Jumlah Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	1 Dokumen
10.	Terwujudnya Pengelolaan Keanggotaan JDIHN di Wilayah	Persentase Anggota JDIHN yang Dikelola terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah	25%
11.	Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	1. Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi	82%
		2. Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi	80%
12.	Meningkatnya Desa Sadar Hukum di Wilayah	Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah	70%
13.	Terwujudnya Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Hasil Analisis Strategi Kebijakan di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah	Persentase Kebijakan Hasil Analisis Strategi Kebijakan di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah yang Ditindaklanjuti	80%

Kegiatan	Anggaran
<b>Program Penegakan dan Pelayanan Hukum</b>	<b>Rp. 7.778.844.000,-</b>
Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah (Kanwil)	Rp. 2.439.601.000,-
Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	Rp. 2.871.760.000,-
Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	Rp. 2.467.483.000,-
<b>Program Pembentukan Regulasi</b>	<b>Rp. 668.890.000,-</b>
Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah	Rp. 520.000.000,-
Penyelenggaraan Fasilitasi Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah	Rp. 148.890.000,-
<b>Program Pemajuan dan Penegakan HAM</b>	<b>Rp. 239.895.000,-</b>
Penyelenggaraan Pemajuan HAM di Wilayah	Rp. 239.895.000,-

<b>Program Dukungan Manajemen</b>	<b>Rp. 275.361.000,-</b>
Analisis Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah	Rp. 275.361.000,-

Yogyakarta, 1 Februari 2024

Pihak Kedua,  
Kepala Kantor Wilayah D.I Yogyakarta



AGUNG REKTONO SETO  
NIP 197012021999031001

Pihak Pertama,  
Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM  
D.I Yogyakarta



MONICA DHAMAYANTI  
NIP 196901251997032002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM D.I YOGYAKARTA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Monica Dhamayanti

Jabatan : Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah D.I Yogyakarta

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Yogyakarta, 1 Februari 2024

Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM  
D.I Yogyakarta

MONICA DHAMAYANTI  
NIP 196901251997032002